



Dorong KKU Raih Opini WTP

TIM Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar dalam melaksanakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi pemerintah daerah berkunjung ke Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Senin (15/7).

Pada kesempatan beraudiensi dengan para pejabat dan pegawai pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersebut, dapat digali berbagai hal terkait raihannya. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab Kayong Utara Tahun 2018.

Menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah Kayong Utara disa-



ASISTENSI : Tim Akuntansi Kanwil DJPb Kalbar berkunjung ke BKD Kab. Kayong Utara dalam rangka asistensi akuntansi, Senin (15/7).

ikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, realisasi anggaran, perubahan saldo

anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai den-

gan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini

wajar dengan pengecualian

yang menyebutkan penyajian nilai aset tetap belum didukung dengan pengelolaan yang memadai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut yang dilakukan, se-lambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Untuk itu dalam sisa waktu yang masih tersedia, jajaran pemerintah daerah harus menyelesaikan rekomendasi yang menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Beberapa kesimpulan dari diskusi tersebut yang dapat menjadi masukan

dalam penyelesaian reko-mendasi hasil pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah Kab. Kayong Utara harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan terkait aset tetap; 2. Jajaran Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen terhadap langkah-langkah strategis tersebut; 3. Permasalahan terkait aset tetap merupakan masalah yang penyelesaian-nya memerlukan waktu yang tidak sebentar, sebagai upaya penyelesaiannya, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berkomunikasi dengan auditor untuk mendalami, memperbaiki, serta menindaklanjuti-nya; 4. Temuan terkait aset tetap merupakan dampak kumulatif dari lemahnya sistem pengendalian inter-nal. (r/*)